

Financial Accounting Standards For Small And Medium Entities (SAK EMKM) Application In MSMEs' Financial Statements (UMKM Case Study In Kediri City)

Gifta Khairul Nisa^{1*}

¹Akuntansi, Universitas Cahaya Surya, Kediri, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Pengajuan awal 02-07-2026
Diterima dalam bentuk revisi
20-07-2026
Diterima 23-07-2026
Tersedia online 30-07-2026

Kata Kunci:

SAK EMKM, UMKM,
laporan keuangan, standar
akuntansi, Kota Kediri.

Keywords:

SAK EMKM, MSMEs,
Financial Statements,
Accounting Standards,
Kediri City

DOI:

<https://10.59356/jemac>

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM biasanya hanya mencatat arus kas yang berasal dari transaksi kas sehari-hari. Dalam upaya membantu UMKM mengatasi tantangan terkait penyusunan laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK EMKM menggunakan basis akrual dan relatif mudah untuk diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah di Kediri. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi bukti-bukti transaksi. Luaran penelitian ini berupa laporan keuangan UMKM ADB yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

ABSTRACT

Small and medium enterprises (MSMEs) typically do not adhere to relevant criteria when preparing financial statements. MSME financial statements typically involve cash derived from daily cash transfers. Institutions in Indonesia, in an effort to assist MSMEs in this sector in overcoming challenges related to financial statement preparation, issued Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprises (SAK EMKM), which came into effect on January 1, 2018. Financial statements prepared in accordance with SAK EMKM are based on the accrual basis and are easy to implement. The application of SAK EMKM in preparing financial statements for small and medium enterprises in Kediri is a learning objective. This research was conducted using a qualitative case study technique and utilized primary data in the form of interviews, direct observation, and documented transaction evidence. The financial statements of ADB MSMEs, including financial situation reports, income statements, and notes to the financial statements, are the results of the research.

1. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan salah satu peristiwa ekonomi paling krusial yang memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Krisis tersebut tidak hanya menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang signifikan. Pada periode tersebut, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang sangat tajam dengan pertumbuhan ekonomi mencapai angka negatif sebesar -13,7%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya perlambatan ekonomi yang sangat serius dan mencerminkan lemahnya struktur ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak global.

Salah satu faktor utama yang memperparah krisis adalah tingginya tingkat kredit macet yang mencapai sekitar 30%. Banyak perusahaan besar mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, terutama akibat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dalam mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga sekitar 90%, beban utang perusahaan meningkat drastis, sehingga memicu gelombang kebangkrutan di berbagai

sektor industri. Berdasarkan data pasar modal, hampir 70% perusahaan yang terdaftar mengalami pailit atau mengajukan kebangkrutan, yang menunjukkan betapa besar dampak krisis terhadap dunia usaha formal. Selain itu, tingkat inflasi yang mencapai 78% menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa secara signifikan. Harga pangan bahkan meningkat hingga 118%, yang berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Dampak lanjutan dari krisis tersebut adalah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, yang menyebabkan sekitar 20 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut, muncul fenomena menarik dimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mampu bertahan dan menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan akibat tekanan krisis, UMKM tetap mampu menjalankan aktivitas usahanya meskipun dalam keterbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi serta ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan pada saat itu menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca krisis. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK serta menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, UMKM dapat dikatakan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama pada saat terjadi krisis.

Peran strategis UMKM tidak hanya terlihat pada masa krisis, tetapi juga dalam kondisi ekonomi normal. UMKM terbukti mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan dan pengembangannya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap permodalan, khususnya dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Banyak UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usahanya secara konvensional tanpa didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang baik. Hal ini menyebabkan sulitnya dalam mengukur kinerja usaha, merencanakan pengembangan bisnis, serta memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Hanifati dan Leo (2019) menyatakan bahwa implementasi SAK EMKM pada pelaku UMKM masih relatif rendah karena keterbatasan pengetahuan akuntansi dan minimnya pendampingan dari tenaga profesional. Penelitian Ilarrahmah dan Susanti (2021) juga menemukan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM. Selain itu, Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan yang baik mampu meningkatkan keberlangsungan usaha melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Penelitian Setyaningsih dan Farina (2021) menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan. Namun demikian, penelitian tersebut dilakukan pada UMKM sektor perdagangan di Jakarta sehingga masih diperlukan penelitian pada wilayah lain, khususnya Kota Kediri yang memiliki karakteristik UMKM berbeda. Oleh karena itu, penelitian

ini dilakukan untuk memberikan gambaran implementasi SAK EMKM pada UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi pelaku usaha maupun pihak eksternal. Tanpa laporan keuangan yang baik, UMKM akan kesulitan dalam mengakses pembiayaan serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Muchid (2015) yang menyatakan bahwa salah satu kendala utama UMKM adalah kurangnya kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Menanggapi permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupaya memberikan solusi dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Standar ini dirancang khusus untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. SAK EMKM hanya mensyaratkan tiga komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas tanpa memerlukan keahlian akuntansi yang kompleks. Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai standar, UMKM diharapkan dapat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan dari perbankan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha. Meskipun demikian, implementasi SAK EMKM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui keberadaan standar tersebut atau belum memahami cara penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait, untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang pencatatan keuangan. Melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerial serta memahami pentingnya laporan keuangan dalam pengembangan usaha. Kota Kediri sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat menjadi lokasi yang relevan untuk dilakukan penelitian. Banyak UMKM di Kota Kediri yang memiliki potensi untuk berkembang, namun masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan keuangan dan akses permodalan. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan SAK EMKM pada UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM serta mengkaji pengaruhnya terhadap akses pendanaan dan pertumbuhan usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha UMKM melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperluas akses terhadap sumber pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau dimiliki oleh orang lain. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar. Kekayaan bersih atau omzet tahunan sebagaimana diatur dalam hukum ini. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Laporan Keuangan

Salah satu komponen siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Siklus penagihan dijelaskan sebagai berikut: Penyesuaian Saldo, Transaksi, Sertifikasi, Jurnal, Buku Besar, Laporan Keuangan, Jurnal Penutupan, dan Neraca Saldo setelah penutupan jurnal. Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi (Haryono Jusup, 2014). Informasi mengenai kinerja suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi didokumentasikan dalam laporan keuangan. Bankir, kreditor, pemilik, dan pihak berkepentingan lainnya dapat menganalisis dan memahami kinerja dan kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan (Asosiasi Akuntansi Indonesia, 2009). Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kinerja dan status keuangan suatu entitas kepada banyak pengguna sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Informasi ini berguna bagi mereka yang tidak dapat meminta laporan keuangan khusus. Di antara para pengguna ini adalah mereka yang memasok sumber daya ke organisasi seperti investor dan kreditor. Laporan keuangan juga menunjukkan tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuannya. (SAK EMKM, 2016).

SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirilis pada tahun 2009 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan dimaksudkan untuk digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun DSAK IAI merilis aturan Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) setelah melihat perlunya aturan akuntansi yang lebih lugas untuk jenis usaha tersebut. Karena SAK EMKM mengatur transaksi hanya dengan menggunakan pengukuran biaya historis, maka prosedur akuntansinya lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Untuk memudahkan akses permodalan bagi pelaku UMKM, SAK EMKM diharapkan dapat membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan (SAK EMKM, 2016). Perusahaan harus menawarkan informasi yang relevan, sebanding, dan dapat dipahami agar laporan keuangannya disajikan secara wajar. Pada akhir setiap periode pelaporan, bisnis menyediakan laporan keuangan yang komprehensif. Untuk kemudahan penggunaan, laporan keuangan UMKM yang diatur SAK EMKM minimal memuat:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, informasi mengenai status keuangan suatu entitas disajikan dalam laporan posisi keuangan dan mencakup rincian ekuitas, liabilitas, dan aset entitas pada tanggal tertentu. Komponen-komponen tersebut dijelaskan oleh SAK EMKM (2016) sebagai berikut:
 - a. Sumber daya yang dimiliki suatu entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan yang diantisipasi akan menerima manfaat keuangan di masa depan dikenal sebagai aset.
 - b. Liabilitas adalah komitmen suatu entitas saat ini yang dihasilkan dari peristiwa masa lalu, yang pembayarannya mengharuskan perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mewakili keuntungan finansial.

- c. Setelah dikurangi seluruh kewajiban suatu entitas, ekuitas adalah sisa kepemilikan atas asetnya. Pos-pos berikut ini disertakan dalam laporan posisi keuangan entitas:
 - 1) Kas dan Setara Kas
 - 2) Piutang
 - 3) Persediaan
 - 4) Aktiva tetap
 - 5) Hutang dari dunia usaha
 - 6) Hutang di bank
 - 7) Keadilan
2. Laporan laba rugi periode tersebut, laporan laba rugi menampilkan data kinerja entitas, yang mencakup rincian pendapatan dan beban untuk periode pelaporan.
 - a. Pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan keuntungan ekonomi yang tidak berasal dari kontribusi investor selama periode pelaporan, seperti arus kas masuk, peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas.
 - b. Beban adalah pengurangan manfaat ekonomi yang terjadi selama periode pelaporan sebagai akibat arus kas keluar, penurunan aset atau liabilitas, atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi investor.

Pendapatan, beban keuangan, dan biaya pajak semuanya dimasukkan dalam laporan laba rugi suatu entitas.
3. Catatan laporan keuangan yang memuat fakta dan tambahan mengenai pos-pos tertentu yang relevan. Informasi berikut ini terdapat dalam catatan laporan keuangan:
 - a. Pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK EMKM
 - b. Ringkasan peraturan akuntansi
 - c. Tambahan data dan informasi mengenai pos-pos tertentu yang memperjelas transaksi penting dan material sehingga pengguna dapat lebih memahami laporan keuangan

UMKM diperbolehkan menyajikan laporan keuangan tambahan, seperti laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, jika diperlukan, meski hanya diwajibkan mencantumkan tiga item di atas. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan lengkap adalah laporan yang memuat catatan atas laporan keuangan terkait dan paling sedikit dua periode untuk setiap laporan keuangan yang diperlukan. Menyiapkan laporan keuangan berdasarkan uang tunai, seperti yang dilakukan banyak pelaku UMKM, entitas menggunakan pendekatan akrual. Ketika pendapatan atau pembayaran tunai dilakukan, asumsi basis kas mencatat transaksi pendapatan dan pengeluaran. Jika suatu pos memenuhi definisi dan persyaratan pengakuan untuk setiap pos, maka pos tersebut dicatat sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban berdasarkan basis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan metode akrual menghubungkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan selama periode waktu yang sama.

3. METODE

Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri menjadi tempat penelitian. Di Kediri, layanan koperasi UMKM bergerak di bidang industri penjualan makanan. Kajian akan berlangsung mulai 20 Februari 2023 hingga 7 Maret 2023. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif. Karena hanya mengkaji satu setting dan periode waktu tertentu layanan koperasi UMKM di Kediri selama bulan Maret 2023 maka disebut studi kasus tunggal. Untuk melakukan observasi langsung pada era yang bersangkutan, peneliti memilih data keuangan terkini pada bulan Maret 2023.

Pemilihan periode Februari - Maret 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada periode tersebut UMKM telah menyelesaikan proses pencatatan transaksi operasional awal tahun sehingga data keuangan yang diperoleh masih lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan belum mengalami perubahan akibat penyesuaian akhir tahun. Selain itu, periode tersebut merupakan waktu pelaksanaan observasi lapangan dan pengambilan data secara langsung

sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang aktual, meminimalkan kehilangan dokumen transaksi, serta memudahkan proses verifikasi data melalui wawancara dengan pihak terkait. Oleh karena itu, periode Februari - Maret 2023 dipilih agar data yang dianalisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi partisipan dan sumber dokumen. Penulis berupaya memperluas observasi, memperkuat ketelitian penelitian, dan melakukan cross check data dengan staf internal Dinas Koperasi UMKM di Kediri agar diperoleh data yang dapat dipercaya. Analisis data dalam penelitian ini bersifat interaktif dan berkelanjutan, meliputi pengumpulan data, penyajian, reduksi, pembuatan laporan keuangan, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sesuai dengan ketentuan dalam SAK EMKM, laporan keuangan yang disusun meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aktivitas operasional pelayanan koperasi UMKM selama periode tahun 2023:

Laporan Posisi Keuangan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini, laporan posisi keuangan disusun berdasarkan ketentuan SAK EMKM yang mencakup tiga unsur utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode waktu tertentu disajikan dalam laporan status keuangan. Berikut data Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri yang menjadi dasar laporan posisi keuangan peneliti:

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan 2023 Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

ASET		LIABILITAS + EKUITAS	
Kas		Liabilitas	
Kas di Bank	3.000.000	Utang Supplier	
Kas di BRI	500.000	Utang Bank	
Kas di BTPN	1.500.000	Utang Gaji	2.000.000
Deposito	10.000.000		
Jumlah Kas & Setara	15.000.000	Jumlah Utang	2.000.000
Kas			
Piutang Usaha			
Persediaan			
Uang Muka Pembelian	20.000.000	Ekuitas	
Gerobak	5.000.000	Modal	
			15.000.000
Akumulasi Penyus. Gerobak	(2.000.000)	Saldo Laba (Rugi)	5.000.000
Motor	12.000.000		
Akumulasi Penyus. Motor	(5.000.000)	Jumlah Ekuitas	18.000.000
Jumlah Aset	45.000.000	Jumlah Liabilitas & Ekuitas	45.000.000

Laporan posisi keuangan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri menunjukkan kondisi keuangan yang relatif stabil dan sehat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah aset sebesar Rp45.000.000,00 yang mampu menutupi seluruh liabilitas dan ekuitas secara seimbang. Struktur keuangan didominasi oleh ekuitas dibandingkan liabilitas, sehingga tingkat

ketergantungan terhadap utang tergolong rendah. Selain itu, tingginya kas dan setara kas mencerminkan tingkat likuiditas yang baik, sehingga entitas mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cukup aman.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi bersih perusahaan (SAK EMKM, 2016). Peneliti menyusun laporan laba rugi pelayanan koperasi UMKM di Kota Kediri sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi 2023 Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri

NAMA AKUN	JUMLAH
PENDAPATAN	
Pendapatan Usaha	15.000.000
Pendapatan Lainnya	500.000
Jumlah Pendapatan	20.000.000
HPP Barang Dagangan	2.000.000
LABA KOTOR	18.000.000
BEBAN	
Biaya Gaji, Bonus dan Tunjangan	2.000.000
Biaya Konsumsi	200.000
Biaya ATK	15.000
Biaya Promosi/Marketing	500.000
Biaya Depresiasi Gerobak	700.000
Biaya Depresiasi Motor	300.000
Jumlah Beban	3.715.000
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	14.825.000

Laporan laba rugi menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri mampu menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp14.825.000,00 dari total pendapatan Rp20.000.000,00. Hal ini mencerminkan kinerja operasional yang efisien dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Beban operasional yang relatif rendah dibandingkan pendapatan menjadi faktor utama dalam menghasilkan laba yang optimal. Dengan demikian, usaha yang dijalankan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan dinas koperasi UMKM di Kota Kediri yang peneliti susun sebagai berikut:

Dinas koperasi UMKM di Kota Kediri Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

- a. Pernyataan Kepatuhan
Laporan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Dasar Penyusunan
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.

- c. Aset Tetap
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dan disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
 - d. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan penjualan diakui saat terjadi pengiriman barang kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadinya.
2. DEPOSITO
Deposito di STK sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil.
 3. UANG MUKA PEMBELIAN
Uang Muka Pembelian senilai Rp 20.000.000 merupakan uang muka yang dibayarkan kepada supplier atas pesanan pembelian barang dagangan

Catatan atas laporan keuangan menunjukkan bahwa penyusunan laporan telah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM, baik dari segi kebijakan akuntansi maupun penyajian informasi tambahan. Penggunaan dasar akrual, metode biaya historis, serta penyusutan dengan metode garis lurus mencerminkan penerapan prinsip akuntansi yang sederhana namun tetap andal. Informasi tambahan seperti deposito dan uang muka pembelian memberikan transparansi yang lebih baik terhadap kondisi keuangan entitas. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan, penerapan SAK EMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sederhana, sistematis, serta informatif. Laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya berguna sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas entitas dalam memperoleh akses pendanaan dan mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM binaan Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri telah mampu menghasilkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Penyusunan laporan keuangan tersebut memberikan informasi yang lebih sistematis, relevan, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi pengelolaan usaha. Selain itu, penerapan SAK EMKM juga berpotensi meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM sehingga membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku UMKM diharapkan dapat menerapkan SAK EMKM secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga diharapkan terus memberikan pendampingan, pelatihan, serta sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian pada berbagai sektor UMKM serta menambahkan analisis mengenai literasi keuangan maupun pemanfaatan teknologi informasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

7. REFERENCES

- Azlina, N., Taufik, T., Putri, S. M., & Indrapraja, M. H. D. (2020). Pelatihan penyusunan laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 66–71. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.66-71>
- Hanifati, R. S., & Leo, L. (2019). Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 127–142. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17002>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilarrahmah, M. D., & Susanti. (2021). Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan , Literasi Keuangan Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(1), 51–64. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3327>
- Milatul Izza dan Khoirina Farina. (2021). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Muchid, A. (2015). Penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 497–510.
- Purba, M. A. (2019). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 98–108. <https://doi.org/10.9744/jak.21.2.98-108>.
- Sari, D. P., & Setyawan, A. (2022). Implementation of SAK EMKM in improving MSMEs financial reporting quality. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 5(2), 145–157. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v5i2.26189>
- Setyaningsih, T., & Farina, K. (2021). PELAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM di PD Pasar Jaya Kramat Jati). *Jurnal Lentera Bisnis*, 10(1), 103. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v10i1.415>
- Utarindasari, D., Ayu Purnama, & Alvia Prihatini. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gandoang. *Jurnal Pengabdian Bina Mandiri*, 1(1), 44–52. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.9>.
- Wijaya, A., & Haryanto, H. (2020). Financial reporting practices among Indonesian MSMEs: Challenges and opportunities. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(7), 1062–1078.